

KAJIAN KRITIS EKONOMI SYARIAH DALAM MENELISIK KEBIJAKAN MONETER SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN PEREKONOMIAN DITENGAH PANDEMI *Corona Virus Disease-19*

Rina Anggraini¹⁾ dan Dhea Ananda Putri²⁾

^{1,2}Magister Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi, Indonesia

email : ¹anggraini17ina@gmail.com

²putridheaananda1@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has become a real enemy for all levels of society, both from the middle to upper and lower middle classes, because this pandemic does not only attack the health aspects but all aspects of life, both in terms of economy, religion to lifestyle so that with this condition the government implements the order. a new life called New Normal. The following article is a literature study on how monetary policy is in maintaining the Indonesian economy amid the Covid-19 pandemic and will be reviewed from a sharia perspective, and will see whether government policies are fair and not only benefit certain parties. The method used is to review several research results that have been published in journals that explain the Covid-19 Pandemic and the policies taken by the government. The findings of this study inform that monetary policy is indeed influential in suppressing the inflation rate and can achieve economic stability, and the more obvious thing is that the government and a set of policy makers have been very fast in responding to the impacts arising from the Covid-19 pandemic undermining the global economy with policy stimuli that have been drawn up to fight the pandemic. From the point of view of sharia, the policies taken by the government already have a very good goal, namely meeting the needs of the people is fair and mashlahah is the main goal, the policies carried out by the government are conceptual and seen from the sharia side it is very good and upholds the welfare of the people.

Keywords: *corona virus disease-19; economic savings; islamic economics, monetary policy*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menjadi musuh nyata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah kebawah, karena pandemic ini tidak hanya menyerang aspek kesehatan melainkan seluruh aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, religi hingga gaya hidup sehingga dengan keadaan ini pemerintah menerapkan tatanan kehidupan baru yang disebut *New Normal*. Tulisan berikut ini adalah studi literature tentang bagaimana kebijakan moneter dalam menjaga perekonomian Indonesia ditengah masa pandemic Covid-19 dan akan ditinjau berdasarkan perspektif syariah, serta akan melihat apakah kebijakan pemerintah sudah adil dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Metode yang digunakan adalah mengkaji beberapa hasil penelitian yang pernah dimuat pada jurnal-jurnal yang menjelaskan seputar Pandemi Covid-19 dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa kebijakan moneter memang berpengaruh dalam menekan laju inflasi dan dapat mencapai kestabilan perekonomian, dan hal yang lebih nyata pada saat ini pemerintah dan seperangkat pembuat kebijakannya sudah dengan sangat cepat dalam menanggapi dampak-dampak yang timbul akibat pandemic Covid-19 yang telah merusak perekonomian global dengan stimulus-stimulus kebijakan yang telah disusun demi melawan pandemic. Dari sudut pandang syariah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu pemenuhan kebutuhan rakyat sudah adil dan *mashlahah* menjadi tujuan utama, pada intinya kebijakan yang dilakukan pemerintah secara konseptual dan dilihat dari sisi syariah sudah sangat baik dan menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: *corona virus disease-19; ekonomi Syariah; kebijakan moneter; penyelamatan perekonomian*

Detail Artikel:

Diterima: 28 November 2020

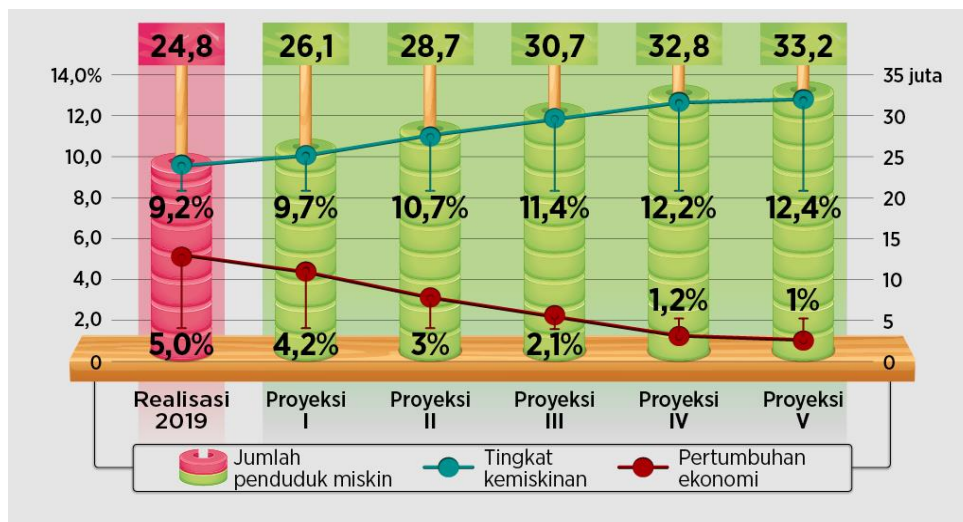
Disetujui: 29 November 2020

DOI : [10.47896/MB.v1i2.295](https://doi.org/10.47896/MB.v1i2.295)

PENDAHULUAN

Berdasarkan kondisi yang terjadi sekarang ditengah pandemi virus Covid 19 membuat situasi perekonomian kian memburuk, dengan diperintahnya *lockdown* dan PSBB oleh pemimpin negara mengakibatkan kalangan menengah kebawah kehilangan mata pencaharian yang mengakibatkan hilangnya daya beli masyarakat dan berlanjut dengan penerapan *new normal* yang sangat membatasi kegiatan masyarakat di berbagai sektor, sehingga akan membuat tingkat konsumsi rumah tangga merosot. Padahal, konsumsi rumah tangga saat ini menjadi komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) terbesar. Artinya, ekonomi Indonesia sangat bergantung dengan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi rumah tangga menyumbang hingga 56,625% terhadap ekonomi Indonesia sepanjang 2019, ditambah juga peredaran uang ditengah masyarakat merupakan polemik yang tidak berkesudahan, ketika uang banyak beredar akan membuat kondisi perekonomian memburuk yang dikenal juga dengan sebutan inflasi, terlalu sedikitpun akan membuat kondisi perekonomian tidak kondusif yang dikenal dengan resesi/deflasi perekonomian.

World Bank mengatakan bahwa dampak pandemic Covid-19 terhadap sector perekonomian akan menghentikan usaha. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam garis kemiskinan. Berikut data ancaman kemiskinan akibat krisis Covid-19 yang juga diprediksi oleh Smeru Research Institute yang mengatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin Indonesia akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemic Covid-19.



Sumber: SMERU, KEMENKEU

Gambar 1
Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis Covid-19

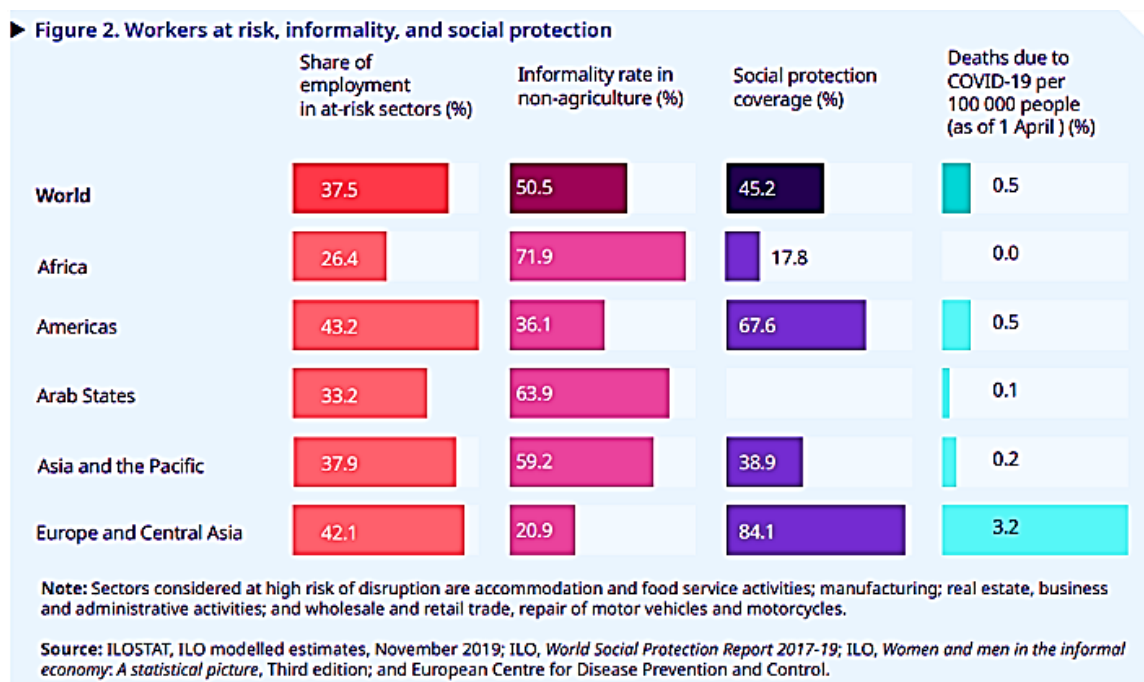
Data ini merupakan Laporan The SMERU Research Institute yang berjudul “*The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*” mereka membuat lima proyeksi peningkatan jumlah orang miskin. Pada skenario terburuk, yaitu jika ekonomi

Indonesia hanya tumbuh 1 persen pada 2020 maka tingkat kemiskinan mencapai 12,4 persen. Jumlah penduduk miskin diperkirakan 33,2 juta penduduk.

Kemiskinan tersebut meningkat dari 2019 yang telah mencapai tingkat kemiskinan satu digit, yaitu 9,2 persen dengan jumlah penduduk 24,8 juta. Laporan ini menjelaskan, tren penurunan angka kemiskinan sejak krisis 1998 akan berakhir. Maka, pemerintah perlu memperluas program perlindungan sosial untuk melindungi penduduk miskin yang semakin bertambah. (Jayani, 2020)

Selain itu, kondisi ini juga diperburuk oleh bertambahnya angka pengangguran di Indonesia di masa pandemic Badan Pusat Statistik merilis data ketenagakerjaan terkini. Tingkat pengangguran berada di bawah 5% pada Februari 2020 atau terendah sejak era 1990-an. Namun, keadaan telah berubah drastis seiring banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan atau usahanya terhenti seiring pembatasan sosial mulai Maret 2020. BPS mencatat, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,68 juta orang pada Februari 2020. Ini artinya, tingkat pengangguran 4,8% dari total angkatan kerja yang sebanyak 137,91 juta orang. Lantas, berapa besar persentase ini akan melambung tahun ini? Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran telah bertambah puluhan juta, jauh di atas data pemerintah yang sebanyak 2-3 juta orang.

Tingkat pengangguran di atas 10% terakhir kali terjadi pada 2006 atau 14 tahun lalu. Ketika itu, tingkat pengangguran mencapai puncaknya setelah terus menanjak sejak krisis keuangan Asia 1998. Tingkat pengangguran berbalik mengalami tren turun mulai 2007. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan sebanyak 1,25 miliar orang di seluruh dunia bekerja di sektor yang terdampak parah oleh corona dan dibayangi risiko PHK. Sektor-sektor tersebut termasuk akomodasi dan jasa makanan; perdagangan retail dan besar, termasuk jasa reparasi kendaraan; manufaktur; dan properti atau real estate. Secara khusus, di Asia dan Pasifik, jumlah tenaga kerja di sektor yang terdampak paling parah ini mencapai 37,9%. (Thertina, 2020) Berikut rincian porsinya di berbagai kawasan:



Sumber: International Labour Organization (ILO)

Gambar 2
Sektor Terdampak Paling Parah Akibat Pandemi

Beberapa peneliti dan praktisi masih memperdebatkan apa yang akan terjadi jika pandemi ini berlangsung lama, dan menurut penulis hal ini akan menyebabkan Indonesia berada pada situasi resesi, kenapa demikian? Karena dapat dilihat pada saat sekarang ini daya beli masyarakat menurun karena kurangnya pendapatan masyarakat dan sebagian perusahaan melakukan pemecatan terhadap karyawannya dikarenakan *cost* yang tidak sebanding dengan *revenue* yang diperoleh. Sehingga peredaran uang ditengah masyarakat mulai menurun dan ini merupakan tanda bahwa perekonomian berada pada fase resesi. Tidak dipungkiri bahwa pemerintah menggolontorkan dana sebanyak mungkin agar daya beli masyarakat meningkat dengan penyaluran bantuan sosial berupa insentif bagi UMKM, insentif pra-kerja, BLT dan bantuan lainnya, dan hal ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami resesi, sehingga pemerintah berupaya keras agar peredaran uang di tengah masyarakat dapat meningkat dengan menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat.

Dalam hal ini diperlukan sebuah model baru yang diadopsi dari bentuk penyesuaian (*adjustment*) bagi seluruh masyarakat untuk bertahan hidup di tengah pandemic ini. Selain penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat disisi lain kebijakan yang diambil pemerintah juga harus sangat hati-hati dan memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, mengingat bahwa puluhan juta warga negara Indonesia berasal dari berbagai macam kalangan, ras, budaya dan agama. Sehingga pada setiap kebijakan yang diambil, pemerintah harus memperhatikan setiap aspeknya.

Tujuan luas dari penelitian *Literature Review* ini penting artinya sebagai input bagi perumusan kebijakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan atau aturan-aturan berikutnya, agar dapat mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan. Tulisan ini bertujuan untuk membantu memberikan informasi tentang apa yang telah ditemukan atau diungkap dari berbagai hasil penelitian terdahulu sesuai dengan topik yang dibicarakan. Selain itu sebagai informasi bagi peneliti yang memiliki ketertarikan pada masalah kebijakan pemerintah dalam menangani pandemic covid-19 terutama dari segi kebijakan moneter dan juga informasi tersebut berguna untuk menentukan arah penelitian kedepannya terutama mengenai hal yang belum terungkap pada penelitian-penelitian terdahulu. Tulisan ini memiliki perbedaan dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu, perspektif yang digunakan selain melakukan pendekatan konvensional juga melalui pendekatan *Islamic teaching*.

TELAHAH LITERATUR

Peneliti mengawali proses identifikasi penelitian yang berkaitan tentang kebijakan pemerintah terhadap pandemic dengan kebijakan moneter sebagai focus utama, proses ini dilakukan dengan cara memilih jurnal-jurnal yang *ter-update* dan sesuai dengan isu yang berkembang ditengah masyarakat pada saat sekarang ini

Peneliti membatasi review ini dengan hanya melakukan review atas jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat dimasa pandemic, keberadaan jurnal-jurnal yang membahas hal ini sudah cukup banyak dan tersedia secara online sehingga dapat diakses dengan mudah, namun dari jurnal yang peneliti rangkum tidak ada satupun yang memandang dari perspektif syariah, sehingga peneliti tertarik untuk melihat serta menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan perspektif *Islamic teaching*. Sehingga didapati beberapa jurnal penelitian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Penelitian Terkait Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi

No	Penulis	Judul	Volume
1	Nur Rohim Yunus,	Kebijakan Pamberlakuan	Vol. 7 No. 3 (2020), Pp.227-238, DOI: 10.15408/Sjsbs.V7i3.15083

No	Penulis	Judul	Volume
2	Annissa Rezki Heri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati	Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia	<i>Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities</i> , Vol. 1 No. 2, 2020: 130-139
3	Dedi Junaedi, Efrita Norman, Moh Romli, Faisal Salistia M Rizal Arsyad	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Stabilitas Moneter Indonesia	Volume 3 No 1 (2021) 17-36 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/Alkharaj.V3i1.149 Volume 3 Nomor 1 2021
4	Ayu Feranika, Dini Haryati	Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19	Volume 2 No.3 2020 146 Copyright © 2020 BIEJ: Business Innovation & Entrepreneurship Journal E-ISSN : 2684-8945
5	Dina Eva Santi Silalahi, Rasinta Ria Ginting	Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 2020 E-ISSN : 2599-3410 P-ISSN : 2614-3259 DOI : https://doi.org/10.36778/Jesya.V3i2.193 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga 156

No	Penulis	Judul	Volume
6	Dwi Dewianawati,	Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Terhadap Produktivitas Pelaku Umkm melalui Variabel Mediasi Keberhasilan Penanganan Covid-19 (Studi Pada Pelaku ukm Di Kota Mojokerto)	Jurnal JEBDEER <i>Journal Of Entrepreneurship, Business Development And Economic Educations Research</i> Volume 4 Nomor 1 September 2020 ISSN 2598-8921 (Printed) ISSN 2598-893X (Online)
7	Abdurrahman Firdaus Thaha	DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA	JURNAL BRAND, Volume 2 No. 1, Juni 2020 E-ISSN : 2715-4920, https://Ejournals.Umma.Ac.Id/Index.8Php/Brand
8	Chairul Iksan Burhanuddin, Muhammad Nur Abdi	Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19),	Jurnal Akmen, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020 Hal.90-98e-ISSN : 2621-4377 & P-ISSN : 1829-8524Homepage : https://E-Jurnal.Stienobel-Indonesia.Ac.Id/Index.Php/Akmen ,
9	Anton Aulawi	Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi	Jurnal Progres Vol 3 No. 2, Agustus 2020 Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan E-ISSN 2622-7037 P-ISSN 2623-0763

No	Penulis	Judul	Volume
10	Yenti Sumarni,	Covid-19 Terhadap Keuangan Negara Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis	Jurnal Al-Intaj, Vol. VI No. 2 September 2020
11	A. Ika Fahrika, Juliansyah Roy	Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh	Jurnal I N O V A S I - 16 (2), 2020; 206-213 Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/INOVAS
12	Putri Sari M J Silaban, Pasca Dwi Putra, Elvira Dilani, Kusniarti Putri Simbolon	Analisis Dan Strategi Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Akibat Covid19 Di Indonesia	Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan “Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra Dan Pasca Covid-19” ISBN: 976-623-94335-0-5
13	Pebri Hastuti, Dita Natania Harefa, Januarti Ira Melenia Napitupulu	Tinjauan Kebijakan Pemberlakuan Lockdown, Phk, Psbb Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Moneter,	Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan “Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra Dan Pasca Covid-19” ISBN: 976-623-94335-0-5

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sebagai sumber data sekunder, peneliti telah menggunakan banyak situs web yang mencakup data terkait ekonomi, diantaranya data dari *World Bank*, Bank Indonesia (BI), *International Labour Organization* (ILO), situs web Badan Pusat Statistik (BPS), situs resmi Kementerian Keuangan (KEMENKEU), *World Health Organization* (WHO), *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan isu yang berkembang ditengah masyarakat serta Situs web Dailymail, BBC, CNN, CNN Indonesia dan sumber-sumber lainnya.

Secara sistematis tulisan ini akan diawali dengan pendahuluan yang membahas tentang situasi perekonomian saat ini dan alasan peneliti mengambil topic penelitian, kemudian menjelaskan metode yang digunakan, mengkaji *literature* yang berkaitan dengan topic lalu membahas bagaimana konsep kebijakan pemerintah khususnya kebijakan moneter karena kebijakan inilah yang menjadi stabilitator inti dari perekonomian yaitu menstabilkan peredaran uang yang mempengaruhi daya beli masyarakat, serta bagaimana Islam memandang kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pada saat sekarang ini. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun kedalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terhadap perekonomian Indonesia saat ini ditinjau dari sudut pandang syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Thaha, 2020) menyebutkan bahwa dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa akan terjadi gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain

1. Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%)
2. Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%)
3. Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%)
4. Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%)
5. Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).

Karena adanya dampak dari pandemic Covid-19 tentu perekonomian dan bisnis di Indonesia menghadapi tantangan untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yenti Sumarni, 2020) yang menunjukkan bahwa dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi pada perekonomian global termasuk perekonomian di Indonesia. Dari dampak pademik ini penurunan permintaan produk-produk syariah dan terhambatnya produksi syariah karena bahan baku berasal dari negara luar, dampak pademik

ini mempengaruhi ini terhambatnya realisasi penanaman modal. Tidak terkecuali, investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah. peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah dari tantangan ini strategi ekonomi dan bisnis syariah bisa mengatasi dampak pademik Covid-19 ini diharapkan para pelaku ekonomi dan bisnis syariah menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Pelaku bisnis syariah menyusun strategi usaha yg lebih menguntungkan. Pelaku bisnis syariah memanfaatkan dan mendukung program stimulus dari pemerintah. perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan, penerapan teknologi digital transaksi dalam satu solusi. Ekonomi dan bisnis syariah dapat berperan memulihkan guncangan ekonomi dengan mengedepankan pencapaian tujuan – tujuan syariah (maqashid syariah).

Tentu jika berdampak pada sector perekonomian maka perlu suatu konsep kebijakan strategis dalam menangani ekonomi dari Covid-19 khususnya bagi masyarakat rentan di Indonesia. Hal senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2020) yang mengatakan bahwa ada tiga kebijakan strategis dalam menanggulangi eksternalitas ekonomi dari Covid-19 yakni Kebijakan Alokasi dengan Realokasi anggaran terhadap proyek-proyek negara yang masih bisa ditunda, pemotongan gaji para pejabat dengan skema mengurangi pada poin-poin di luar gaji pokok yang bisa dijadikan dana talangan penanggulangan covid, khususnya anggaran subsidi pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian Kebijakan Distribusi yakni Strategi kebijakannya dapat dilakukan melalui skema pembagian bantuan tunai dan bahan pokok (sembako) per bulan minimum 1.2 juta jika satu orang korban PHK menanggung dua orang anggota keluarga, sambil memberi stimulasi kepada UMKM. Selain itu, subsidi pada domain tertentu juga diberikan kepada masyarakat, sehingga antara pemerintah, masyarakat kelompok sasaran dengan UMKM saling membutuhkan, dan negara hadir memberi stimulasi kepada keduanya, maka daya beli masyarakat ditopang oleh distribusi input yang dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi ini. Pelatihan online tidak efektif disaat pandemi. Dan yang terakhir adalah Kebijakan Stabilisasi yakni dengan Menjaga ketahanan pangan dengan menaikkan bantuan sembako, minimum Rp 100-200 Trilyun untuk menyediakan bantuan pangan sampai akhir tahun. Selain itu, secara makro pemerintah bisa melakukan kebijakan menurunkan bunga acuan BI 25-50 basis poin untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil, bahkan pemerintah bisa berikan subsidi bunga.

Namun jika dikaitkan dengan stabilitas moneter tentu perlu adanya berbagai kebijakan yang harus dilakukan. Dimulai dari kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan lockdown, PSBB bahkan sampai pada akhirnya suatu perusahaan pun mengambil sebuah kebijakan dengan melakukan putusan hubungan kerja (PHK). Hal senada juga disampaikan oleh (Hastuti et al., 2020) dalam Webinar fakultas ekonomi Universitas Negeri Medan yang bertemakan Strategi dunia usaha menyikapi status Indonesia sebagai Negara maju pra dan pasca Covid-19, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari Covid-19 bagi perekonomian Indonesia saat ini yang lebih komprehensif dari berbagai alternatif skenario penanganan pandemi Covid-19. Virus ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian di seluruh dunia tetapi juga menyebabkan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan "membunuh" negara-negara di seluruh dunia.

Kepanikan di kalangan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar. Jika pandemi ini terus meningkat maka banyak orang yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka. Pengangguran di Indonesia yang menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Oleh karena itu peran, upaya dan kebijakan dari pemerintah lah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upaya yang pemerintah lakukan saat ini adalah dengan memberikan berbagai macam bantuan sosial dengan harapan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun ada pembatasan pembatasan yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Masyarakat Indonesia diminta untuk mengikuti segala arahan pemerintah dengan harapan memulihkan kembali keadaan seperti sedia kala. Dalam setiap kebijakan pemerintah perlu melihat apakah hal tersebut akan berjalan seefektif mungkin. Banyak hal yang sudah pemerintah beri kepada masyarakat untuk menuntaskan masalah ini, namun beberapa pihak mungkin menyalahgunakan data dan dana demi kepentingan pribadi. Ketidakjujuran ini membuat keadaan masyarakat yang semakin resah, banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sepertinya banyak data dan dana yang salah sasaran. Ketidakpastian ekonomi ini pun sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya masyarakat bisa bekerja dengan baik, namun dikarenakan mewabahnya virus ini semua kegiatan ekonomi lumpuh. Masyarakat dan pemerintah harus bergandengan tangan mengatasi masalah ini.

Penelitian yang sama yang juga membahas kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran Corona Virus Covid-19 dilakukan oleh (Yunus & Rezki, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19.

Selain dari kebijakan di atas, tentu dalam menjalankan kebijakan tersebut perlu adanya kerjasama dari masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menghadapi pandemic covid-19 yang bukan saja bekerjasama dalam hal sektro moneter saja, namun dalam segi kebijakan fiskal pun perlu juga diperhatikan. Dalam hal kebijakan fiskal tentu perlu adanya strategi terhadap barang yang dihasilkan sekaligus bagaimana kaitannya dengan inflasi pada perekonomian di Negara kita dalam menghadapi dampak virus covid-19. Hal senada juga disampaikan oleh (Feranika & Haryati, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Dari sisi penerimaan, pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan dan dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemik Covid-19 untuk menekan defisit anggaran. Strategi kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 3 stimulus. Pembiayaan-pembiayaan pemerintah dapat melakukan *refocusing*/revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemic Covid-19. Selain itu, dengan kebijakan new normal baru-baru ini, diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan mengontrol pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian yang sama yang membahas tentang strategi kebijakan fiskal juga dilakukan oleh (Silalahi & Ginting, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai target penerimaan negara adapun kebijakan fiskal yang dilakukan yaitu merevisi target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik. Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan melakukan *refocusing* dan revisi anggaran untuk menekan angka defisit APBN untuk membantu pembiayaan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata, berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk menopang sektor industri serta memudahkan ekspor impor dan juga bidang kesehatan.

Dalam Hal pemberdayaan UMKM pun, kebijakan fiscal dan moneter juga berperan andil didalamnya untuk tetap menjaga produktivitas pelaku UMKM melalui keberhasilan penanganan Covid-19. Penelitian terhadap hal ini dilakukan oleh (Dewianawati, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan fiskal tidak berpengaruh terhadap Keberhasilan penanganan Covid-19, Kebijakan moneter berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan penanganan Covid-19, Kebijakan fiskal tidak berpengaruh terhadap Produktivitas pelaku UMKM, Kebijakan moneter tidak berpengaruh terhadap Produktivitas pelaku UMKM, Keberhasilan penanganan Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas pelaku UMKM, Kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas pelaku UMKM melalui Keberhasilan penanganan Covid-19 dan . Kebijakan moneter berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas pelaku UMKM melalui Keberhasilan penanganan Covid-19.

Dalam menghadapi pandemic Covid-19, bukan saja mengenai sector usaha saja yang diperhatikan, Melainkan kebijakan pajak pemerintah pun turut menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai bentuk dari penerimaan keuangan Negara. Penelitian mengenai hal ini dilakukan oleh (Aulawi, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Kebijakan di bidang perpajakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai upaya dalam mengahdapi pandemic Covid19 yang meliputi:

1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
2. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
3. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
4. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepastian berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Jika ditinjau dari segi analisis mikro dan makro, dampak pandemic Covid-19 memang memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek perekonomian. Penelitian akan hal ini dilakukan oleh (Fahrika & Roy, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun Kebijakan pemerintah yang harus ditempuh dalam upaya mengatasi masalah-masalah ekonomi makro selama pandemi Covid yaitu terbagi dalam 2 jaring pengaman yaitu, Jaring Pengaman Sosial dengan cara penambahan dan dukungan dari pembiayaan APBN dan Jaring Pengaman Ekonomi dengan cara pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Stimulasi-stimulasi lain yang juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian adalah Pertama, dikeluarkan, Perppu 1 Tahun 2020. Kedua, dikeluarkan kebijakan perpajakan Ketiga, dikeluarkan Kebijakan di Sektor Keuangan.

Sebenarnya jika ditelisik lebih jauh, covid-19 dapant menjadi ancaman krisis perekonomian. Penelitian mengenai hal ini dilakukan oleh (Burhanuddin & Abdi, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat perkembangan dan pengaruh ekonomi tidak hanya sebatas lingkup ekonomi itu sendiri. Akan tetapi ekonomi juga bisa terdampak dari budaya dan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan menyebarnya virus Corona turut membawa dampak negatif pada perekonomian dunia.

Kemudian masalah lain yang juga disebabkan oleh Covid-19 adalah bagaimana dengan persoalan uang beredar. Tentu hal ini perlu strategi dalam menjalankannya. Penelitian akan hal ini dilakukan oleh (Silaban & Dilani, 2020) yang menyatakan bahwa secara simultan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan kurs rupiah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi inflasi akibat covid 19 di Indonesia. Sehingga kebijakan dunia usaha dalam menghadapi new normal berupa, manajemen krisis, tenaga kerja, pajak dan perdagangan dan strategi riset dan pemasaran.

Persoalan jumlah kasus dan kebijakan pemerintah juga dibahas dalam penelitian (Junaedi & Norman, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan jumlah kasus pandemi dan perbedaan kebijakan berpengaruh nyata terhadap stabilitas rupiah. Secara simultan, stabilitas nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh variabel pandemic (kasus, kematian, eksembuhan dan kebijakan penanganan pandemic, jumlah uang beredar (M1, M2), operasi pasar (konvensional dan syariah), suku bunga acuan (BI-rate), tingkat inflasi cadangan devisa, indeks saham keuangan. Variabel-variabel bebas tersebut berkorelasi dengan nilai tukar rupiah dengan koefisien korelasi R2 0.927073. Kebijakan penanganan pandemi, apa pun namanya, cenderung memperlemah posisi nilai tukar rupiah. Secara relatif, pemberlakuan masa transisi new normal ternyata paling besar menekan nilai tukar rupiah. Sementara pembentukan satgas dampaknya lebih ringan dalam menekan rupiah dibanding kebijakan lainnya.

Konsep Kebijakan Pemerintah

Dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori *ushul fiqh* dinamakan al maslahah al ammah. Sedangkan mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya. Inflasi dapat menguntungkan golongan masyarakat tertentu tetapi merugikan golongan lain, sehingga didalam pembuatan kebijakan didalam suatu persoalan pemerintah harus bisa memberikan keadilan kepada setiap pihak.

Ditambah lagi dengan pentingnya “uang” dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang biasanya hal ini terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian *monetary aggregates* (besaran moneter, diantaranya berupa uang beredar, uang kredit atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jumlah uang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian dan stabilitas harga-harga. Uang beredar yang terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan naiknya tingkat harga dalam perekonomian, yang sering disebut dengan inflasi. (Nasution, 2006)

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk terus tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. (Pratama Rahardja, 2008) Selain itu kebijakan moneter dapat pula berarti sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral, agar ekonomi tumbuh lebih cepat. (M.Nur Rianto, 2010)

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan AL Qur'an dalam QS. Al-An'am:152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari'ah berbeda dengan konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun

rate return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrument bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil.

Jika dicermati, krisis yang terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, pada dasarnya dipicu oleh dua sebab utama yang terkait dengan masalah uang, yaitu: (Ghofur, 2017).

- ✓ Persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain, tidak pada dirinya sendiri, sehingga nilainya tidak pernah stabil. Sebab jika nilai mata uang negara tersebut bergejolak, tentu akan memengaruhi kestabilan mata uang yang lain.
- ✓ Kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan atau bunga dari setiap transaksi pinjaman.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, (Ghofur, 2017) yaitu:

- ✓ Kebijakan Moneter Ekspansif
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar.
- ✓ Kebijakan Moneter Kontraktif
Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat.

Kondisi Perekonomian ditengah Wabah Covid-19

Jika kita kaitkan dengan kondisi pada saat ini, merebaknya virus Covid-19 perlu diwaspadai karena menahan prospek pertumbuhan ekonomi. Meski diiringi kualitas yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia berlum beranjak dari kisaran 5%. Pada Januari 2020, IMF memangkas proyeksi ekonomi global dari proyeksi *World Economic Outlook* Oktober 2019. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 dipangkas 0,1% dari 3,4% menjadi 3,3%. Prediksi melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia ini harus diantisipasi. Posisi ini berpotensi besar melemahkan investasi, meningkatkan pengangguran dan menghambat produktivitas. (Aini, 2020)

Bank Indonesia awalnya pada Februari 2019 memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5-5,4%, namun kemudian dikoreksi menjadi kisaran 4,2-4,6% pada Maret 2020. Sampai saat ini dampak penyebaran corona terhadap perekonomian masih belum dapat dihitung secara pasti, namun perlambatan perekonomian sudah terasa, terutama di sector pariwisata, industry pengolahan, perdagangan, transportasi dan investasi. Untuk mengantisipasinya, sejumlah stimulus harus dikeluarkan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. (Pratomo, 2020)

Stimulus Kebijakan Moneter ditengah Pandemi

Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan, serta bersinergi erat mengambil langkah langkah kebijakan lanjutan yang

diperlukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta pemulihan ekonomi nasional. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri dari enam aspek penting sebagai berikut:

1. Menurunkan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) sebesar 100 bps sejak awal tahun 2020 menjadi 4,00%. Penurunan dilakukan pada Februari, Maret, Juni, dan Juli 2020 masing-masing sebesar 25 bps. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemic COVID-19. Sementara itu, pada RDG April, Mei, Agustus, September dan Oktober 2020, Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR dengan pertimbangan menjaga stabilitas stabilitas eksternal, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah.
2. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar ditengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Indonesia melakukan stabilisasi dan penguatan Rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan triple intervention di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
3. Memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas juga terus dilakukan. Hal ini ditempuh antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi swap valas, dan penyediaan term repo untuk kebutuhan perbankan, serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).
4. Melakukan injeksi likuiditas (Quantitative Easing) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Sampai dengan 9 Oktober 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas sekitar Rp 667,6 triliun yang dilakukan antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah hingga sebesar 300 bps.
5. Penyediaan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Bank Indonesia juga menurunkan batasan minimum uang muka (down payment) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
6. Menjaga kemudahan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi nontunai, seperti uang elektronik, internet banking, maupun penggunaan QRIS.

Tinjauan Kebijakan Moneter dari Sudut Pandang Syariah

Kondisi yang terjadi saat ini bersumber dari aspek kemanusiaan karena pandemi COVID-19 yang kemudian berdampak ke sektor ekonomi dan keuangan secara global. Semakin cepat dalam mengatasi pandemik COVID-19, maka dampak ke sektor ekonomi dan keuangan semakin cepat diminimalisir. Selanjutnya disampaikan bahwa dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi sangat minimal dan inflasi tetap terkendali karena hal berikut:

- ✓ ketersediaan pasokan yang cukup
- ✓ kesenjangan *output* atau output gap masih negative

- ✓ kredibilitas kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas harga dan sasaran inflasi ($3\pm 1\%$) tercapai termasuk melalui koordinasi bersama TPIP dan TPID
- ✓ pelemahan rupiah saat ini bersifat temporer karena kepanikan global.

Pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan sudah membaik, terutama didorong stimulus fiskal dan perbaikan ekspor. Perkembangan Agustus-September 2020 menunjukkan belanja Pemerintah meningkat didorong stimulus fiskal terkait perlindungan sosial dan dukungan UMKM. Ekspor lebih baik dari prakiraan ditopang berlanjutnya permintaan global, terutama dari AS dan Tiongkok. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Sejalan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar dan mendorong penurunan suku bunga. Ketahanan sistem keuangan tetap kuat, meskipun risiko meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Transaksi Sistem Pembayaran, baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan perbaikan ekonomi, disertai percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dapat kita lihat akan terus diperkuat.

Jika kita lihat di masa pandemic ini nilai rupiah semakin melemah karena permintaan akan mata uang dalam negeri semakin menurun, pada dasarnya apabila banyak permintaan akan uang, maka nilai mata uang tersebut akan naik. Dalam konsep ekonomi Islam, uang di gunakan dalam transaksi untuk kegiatan yang bersifat rill. Namun, kenyataan terkadang uang digunakan dalam kegiatan bersifat spekulasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka tidak jarang banyak masyarakat menggunakan jenis uang yang lain selain rupiah, seperti dolar Amerika. Sedangkan dalam islam sudah jelas-jelas menggunakan uang dalam hal kegiatan transaksi spekulasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dilarang. Hendaklah sebagai warga negara melakukan transaksi dengan mata uang rupiah, menunda berbelanja barang barang impor sehingga dapat menstabilkan nilai mata uang rupiah.

Uang dalam perekonomian makro di atur dalam moneter. Manajemen moneter yang mana dalam pengelolaannya berbasiskan pada nilai-nilai Islam, diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan.

Dengan tidak berlakunya bunga pada sistem ekonomi Islam yang mana merupakan perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, secara tidak langsung, perekonomian akan terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Dimana spekulasi yang merupakan "Hantu" pada sistem konvensional, menjadi aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini, jika tidak hilang, dapat diminimalisir dengan penerapan *profit and loss Sharing* pada *finansial intermediation* yang dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregat *money demand* untuk kegiatan yang *non esensial* dan non produktif, sehingga efisiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi. Selanjutnya oleh karena sumber utama dari *high powered money* umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka dalam hal ini Islam menuntut adanya independensi bank central dan konsistensinya kepada pencapaian target-target moneter. Tanpa ini, tentulah kebijakan moneter sulit dijalankan. Bank sentral tentulah kesulitan menolak pinjaman pemerintah selama ia berada dibawah campur tangan pemerintah. Satu hal perlu menjadi perhatian, bahwa manajemen moneter Islam, yang selama ini dipraktekkan pada berbagai Negara, membawa efek positif pada skala periode jangka panjang, akan tetapi, sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek. Untuk memecahkan persoalan jangka pendek, instrument yang paling memungkinkan adalah *Moral Suasion* (bujukan Moral) dan *statutory reserve requirement*, berupa peningkatan cadangan wajib.

Lalu jika dilihat dari segi kebijakan upah nominal yang ditetapkan oleh pemerintah di masa pandemic ini, bisa dilihat dari kebijakan pemerintah di daerah masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 gubernur dan bahkan walikota memberikan komando pada perusahaan dan kementerian yang terkait untuk melindungi para karyawan supaya tetap menerima upah. Sehingga sebagian atau seluruh buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dengan buruh. Nilai-nilai ekonomi islam sudah tercerminkan dari kebijakan ini, faktanya dapat dilihat dari kebijakan kementerian ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pekerja Terpapar Covid-19, Tetap menerima Hak sesuai surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yaitu pekerja dinyatakan dokter berstatus ODP atau suspek Covid-19 dan tidak masuk kerja maksimal 14 hari, berhak menerima upah penuh, pekerja yang sakit akibat Covid-19, maka upah dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan yang meliburkan pekerja karena kebijakan pemerintah daerah, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan.

Dalam perihal ini bisa kita lihat dari sikap saling membantu, saling berbagi, saling tolong menolong, dan adanya keadilan dalam kondisi pandemi covid 19 yang bersumber dari kebijakan pemerintah hingga sikap masyarakat sangat sesuai dengan kaidah Islam. Semua masyarakat bersatu bersama pemerintah untuk melakukan kegiatan sosial dan menjalankan kebijakan tersebut. Terbukti dari setiap ormas ikut turun untuk menggalang dana guna bisa membantu meringankan beban masyarakat. Dalam Islam mengajarkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana dalam surat al-maidah ayat 2:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dan salah satu cerminan dari sudah sesuainya kebijakan moneter yang diambil oleh lembaga terkait dengan kaidah Islam meskipun belum sepenuhnya adalah dengan kebijakan yang memperkuat operasi moneter serta pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). Dan juga kebijakan pemerintah yang memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah, dan program padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan. Kebijakan seperti itu bisa membangun negara dan masyarakat yang kuat untuk menyelesaikan pandemi covid 19 ini. Masyarakat memiliki sumber daya yang berlimpah dan pemerintah membantu perihal tersebut untuk dapat di produktifkan lebih maksimal sehingga masyarakat mampu melewati pandemi ini.

SIMPULAN

Berdasarkan teori dan praktik yang sudah terlihat dari penelitian-penelitian terdahulu, umumnya menunjukkan bahwa kebijakan moneter memang berpengaruh dalam menekan laju inflasi dan dapat mencapai kestabilan perekonomian, dan hal yang lebih nyata lagi kita lihat pada saat ini pemerintah dan seperangkat pembuat kebijakannya sudah dengan sangat cepat dalam menanggapi dampak-dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19 yang telah merusak perekonomian global dengan stimulus-stimulus kebijakan yang telah disusun dan

menggelontarkan dana hingga Rp.400 triliun demi melawan pandemic ini dan menjaga agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan meskipun tidak dapat melakukan kegiatan perekonomian. Dari sudut pandang syariah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu pemenuhan kebutuhan rakyatnya, sudah adil dan *mashlahah* menjadi tujuan utama, penilaian negative tentang kebijakan timbul ketika adanya penggunaan wewenang yang disalah gunakan, pada intinya kebijakan yang dilakukan pemerintah secara konseptual dan dilihat dari sisi syariah sudah sangat baik dan menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat.

Saran

Pemerintah dan Bank sentral harus menjalankan kebijakan moneternya lebih merata lagi untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang tepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan kesejahteraan merata bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran Islam ini tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus sejalan seirama. Praktik-praktik yang monopolistis dan penyelewengan kekuasaan harus dihilangkan serta setiap usaha harus dilakukan untuk menggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan barang dan jasa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hellyyani, SE, MM selaku Ketua STIE Haji Agus Salim dan Ibu Dr. Anne Putri, SE, M.Sc selaku Ketua P3M STIE Haji Agus Salim yang telah memberikan dorongan sebesar-besarnya hingga tulisan ini berhasil diselesaikan. Kami selaku Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang sudah diberikan untuk menulis penelitian ini. Kami berharap tulisan kami dapat menjadi acuan dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah* (1st ed.). Depok: Raja Grafindo Persada.
- M.Nur Rianto. (2010). *Teori Ekonomi Islam Konsep Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, D. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pratama Rahardja. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: LPFE UI.
- Aini, W. (2020, April). Mewaspada Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi. *Kompas*.
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AkMen*, 17(April), 90–98.
- Dewianawati, D. (2020). Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Terhadap Produktivitas Pelaku UMKM Melalui Variabel Mediasi Keberhasilan Penanganan Covid-19 (Studi pada Pelaku UKM di Kota Mojokerto). *Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 4(1), 15–30.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh The impact of the Covid

- 19 pandemic on macroeconomic developments in Indonesia and the policy response taken. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Jayani, D. H. (2020). Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis Covid-19. In *Katadata*.
- Junaedi, D., & Norman, E. (2021). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Stabilitas Moneter Indonesia Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.149>
- Kurniawan, H. H., Salahuddin, A. M., Muslim, & Sri, N. (2020). *Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia Heri. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No.(2)*, 130–139. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- M.Nur Rianto. (2010). *Teori Ekonomi Islam Konsep Teori dan Analisis*. Alfabeta.
- Nasution, D. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- Nilai, D. A. N., Terhadap, T., Akibat, I., Di, C., Silaban, P. S. M. J., & Dilani, E. (n.d.). *INDONESIA*. 74–85.
- Pratama Rahardja. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. LPFE UI.
- Pratomo, W. A. (2020, April). Bauran Kebijakan Melawan Dampak Covid-19. *INews.Id*.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153.
- Thertina, M. R. (2020). Memprediksi Lonjakan Jumlah Pengangguran RI Imbas Corona. In *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/2020/05/06/memprediksi-lonjakan-jumlah-pengangguran-ri-imbis-corona>
- Yenti Sumarni. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>
- Aini, W. (2020, April 4). *Mewaspada Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi*. Kompas.
- Pratomo, W. A. (2020, April). Bauran Kebijakan Melawan Dampak Covid-19. *INews.Id*.
- Jayani, D. H. (2020). Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis Covid-19. In *Katadata*.
- Thertina, M. R. (2020). *Memprediksi Lonjakan Jumlah Pengangguran RI Imbas Corona*. In *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/2020/05/06/memprediksi-lonjakan-jumlah-pengangguran-ri-imbis-corona>